

Demokrasi dalam pluralitas: refleksi hegemoni barat-Islam

Muh. Zuhri

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga
Jalan Tentara Pelajar No. 2 Salatiga*

In pluralistic society, democracy has become the best solution for respecting human rights dan giving the freedom of expression. Normatively, democracy could solve any social-political issues through majority voices. Even though, Islam has not mention the term of democracy, its basic tenets teaches that humankind is equal before God; and it teaches that the nobility of humankind depends on their proximity and nearness to God. Islam explicitly forbids the believe in that one nation to claim their superiority than the others. In Islam, *syura* has the significant role of solving any kinds of problem in living together. Thus, democracy in principle did not transgress the Islamic teaching on humanism. On the contrary, sectarianism has created negative sentiment and conflict between East and West which apparently represented by United States and Middle East. Through their sophisticated camouflage the United States has accused almost Islamic countries as the hotspot of terrorism, even thought their indictment has been factually wrong and misguided.

Keywords: *Democracy; Fundamentalism; Conflict; Syura; Communication*

Pendahuluan

Warna-warni itu bukan saja indah, tetapi juga menambah semarak, kalau saja ditata serasi dan apik. Sebaliknya, kalau penataannya asal-asalan dapat menimbulkan kegerahan dan uring-uringan. Hampir semua negara terdiri atas dan didukung oleh sejumlah kelompok masyarakat dengan sederetan ragam latar belakang primordial, suku, agama, budaya, warna kulit. Tidak diragukan bahwa kedamaian, ketenteraman, kemakmuran dan keadilan merupakan cita-cita dan kebutuhan universal. Baik individu maupun kelompok dengan varian primordialnya ingin mencapai dan mewujudkannya. Tetapi apa yang diinginkan tidak selalu menjadi kenyataan.

Selalu ada jarak antara *das sein* dengan *das sollen*, antara teori dengan praktik. Kemajemukan latar belakang kehidupan punya implikasi keragaman paradigma dalam menatap hal yang sama. Dalam bahasa Jawa sederhana disebutkan *seje silit seje anggik*, plesetan dari kalimat *seje kulit seje anggik*. Ide yang terkandung dalam kalimat itu sama dengan “kepala sama hitam tetapi pikiran tidak selalu sama.” Itu kalau terkait individu. Kalau terkait kelompok, ada ungkapan *desa mawa cara, negara mawa tata*. Ini sejalan dengan ide “lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya.” Untuk menjamu makan tamu, orang Aceh tidak menyertai tamunya makan, tetapi mengintip dari luar ruang makan. Setiap kali lauk di salah satu piring yang disediakan di meja makan berkurang, tuan rumah -mengetahui melalui mengintip- menambah isinya, sebagai bukti bahwa tuan rumah dengan senang hati menyajikan hidangan kesenangan tamunya. Seolah tuan rumah berkata, tamu tidak perlu khawatir, apa yang disenangi selalu tersedia. Lain Aceh lain Batak. Orang Batak ikut makan bersama tamu. Hanya, ketika telah menyantap satu atau dua suap bersama tamu, piring yang masih banyak isi itu diletakkan seraya ia mencuci tangan, airnya dituangkan di piring tadi. Seolah ia berkata, tamu tidak perlu memikirkan tuan rumah. Tuan rumah sudah kenyang. Buktinya, makanan disisakan dan tangan sudah dicuci ketika tamu sedang menikmati hidangan nasi. Sama bertujuan menghormati tamu tetapi caranya sering berbeda.

Dalam tradisi Minangkabau, setidaknya tempo dulu, karena menggunakan prinsip matri-lineal, pihak wanitalah yang meminang pihak pria ketika hendak melangsungkan pernikahan. Masyarakat Jawa dengan sistem patrilineal mempunyai tradisi, pihak pria yang melamar pihak wanita. Dengan sistem tradisi yang berbeda ini maka pernikahan tidak dapat berlangsung bila calon suami orang Minang, sementara calon isteri orang Jawa, karena tidak ada pihak yang secara tradisi boleh berinisiatif melamar/meminang. Sebaliknya, bila calon suami dari Jawa dan calon isteri dari Minang, maka akan terjadi saling meminang karena keduanya diperintahkan berinisiatif melamar oleh tradisinya masing-masing. Baik kasus pertama maupun kedua sama-sama merepotkan. Tentu dapat dicari penyelesaian, dengan jalan kompromi. Masing-masing pihak perlu mengangkat “juru damai” untuk saling memahami. Tanpa ada upaya kompromi, maka perpecahan yang terjadi.

Perbedaan tampilan budaya, etnis dan agama semata, tampaknya tidak mudah mendorong lahirnya konflik kendati diakui potensial untuk itu. Kalaupun ada percikan karena

perbedaan itu, secara teoritik mudah dicarikan solusinya. Ini dikarenakan budaya dan agama itu mengandung kesamaan misi utama menciptakan masyarakat teratur, tertib dan damai. Dengan suasana seperti ini kebudayaan berkembang baik.

Bila kita menangkap kesan konflik agama, bukan agama yang mendalangi konflik. Agama tidak menyuruh pemeluknya menyerang orang lain karena perbedaan agama. Agama tidak mengajarkan itu. Dalam kenyataan sering terjadi perang antar agama dan sekte serta antar suku. Karena itu ada yang mengatakan, kalau ada orang menolak beragama, karena ia melihat agama itu sumber konflik, perpecahan dan peperangan. Betapa tidak? Pertikaian di Eropa, di Afrika maupun di Asia, hampir selalu diwarnai oleh perbedaan agama, paling tidak, perbedaan paham atau sekte keagamaan (Nurcholish Madjid: 1993, 7). Pertikaian yang berkepanjangan di Propinsi Maluku sejak mengakhiri era Orde Baru tidak mudah meredakannya karena tampaknya ada pihak yang berkepentingan, ditandai dengan peristiwa ledakan bom yang cukup dahsyat pada minggu pertama bulan April 2002. Rentetan peristiwa di sana menunjukkan nuansa perang karena berbeda agama. Setidaknya, perbedaan agama dapat disulut untuk konflik besar oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu. Konflik yang terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, bernuansa perang antar suku. Kalau secara teoritik konflik semacam itu tidak perlu terjadi, tetapi nyatanya telah terjadi, tentu ada suatu kepentingan di balik itu semua. Ditengarai, pihak yang diperosokkan ke dalam konflik jenis ini tidak menyadari bahwa mereka dijadikan alat kepentingan.

Setelah diamati secara mendalam, ternyata perang memperjuangkan kemerdekaan, di belahan dunia mana saja, adalah bentuk konflik dilatarbelakangi oleh problem politik dan ekonomi. Kolonial dari Barat yang terlanjur nyaman menguras potensi ekonomi bangsa terjajah enggan meninggalkan daerah jajahannya, sementara, bangsa terjajah tidak tahan terlalu lama dalam pijakan kolonial. Mereka ingin membangun ekonomi dengan kekuatan politiknya sendiri. Konflik antar kelas atau perebutan kekuasaan pada kaliber lokal dan regional di setiap benua, misalnya di Jawa pada era Singosari, Majapahit, Demak, dan sebagainya, bahkan sampai hari ini pun, tidak jauh dari problem di atas. Agama, tidak terkecuali Islam, tentu mempunyai kiat-kiat mengatasi problem tersebut. Bagi dunia modern, demokrasi diyakini sebagai bayi yang kelak menjadi dewa penyelamat mengatasi berbagai konflik.

Kepentingan ekonomi dan politik

Dalam bahasa Eropa, politik seakar kata dengan politeia, poli, polish. Artinya, hal yang berkaitan dengan keteraturan dan ketertiban. Selanjutnya, kata itu digunakan untuk menyebut area yang suasananya idealis seperti itu, kota. Disebut Konstantinople karena ia sebuah kota (poli) yang didirikan oleh raja Konstantine. Maka istilah politik dan polisi, kalau kita kembali kepada arti harfiyah, selalu berasosiasi dengan kota, ketertiban dan keteraturan. Jadi, polisi sekarang ini sebenarnya punya tugas utama menjaga keteraturan dan ketertiban dalam rangka terwujudnya kota yang ideal. Politik menurut bahasa (dalam bahasa Indonesia) berarti kebijaksanaan yang terkait dengan kekuasaan dan atau pemerintahan negara (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia: 1988, 694). Tentu, kaitannya dengan ide di atas adalah ketertiban dan keteraturan yang diciptakan dengan kebijaksanaan dalam kekuasaan. Dengan kebijaksanaan maka politik terkait erat dengan misi dan ideologi. Mengingat bahwa tabiat manusia itu menghendaki ketertiban, keteraturan, dan juga kedamaian, maka politik berfungsi positif, setidaknya dipahami sebagai sesuatu yang netral. Hal ini tergantung pada tujuan. Tetapi ia bisa dikotori dan bisa dijaga kebersihannya; bisa dimanfaatkan seperti menggalang kerukunan dan bisa dibuat mendatangkan petaka seperti menciptakan konflik. Itu sebabnya ada ungkapan bahwa politik itu kotor, karena politik menjadi wahana untuk saling menjatuhkan.

Kalau pada politik itu terlekat kekuasaan, maka hasil apakah yang diperoleh dari perjuangan politik? Tergantung pada motivasi perjuangannya. Adalah menarik untuk diperhatikan bahwa dalam sejarah, berdirinya sebuah negara terkait dengan kemakmuran geografis. Area yang sumber daya alamnya tidak menjanjikan tidak menarik minat orang mendirikan pemerintahan negara, sehingga di sana kebudayaan tidak berkembang. Begitu juga ketika bangsa Eropa melanglang buana sebagai penjajah, mereka memilih area yang sumber daya alamnya bagus. Area yang sumber daya alamnya jelek -seperti Arabia tempo dulu- tidak menarik untuk dijadikan wilayah jajahan. Dengan ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dengan kendaraan politik terkait dengan kepentingan ekonomi yang ditandai dengan penguasaan di "lahan subur". Hal ini diperkuat dengan perilaku politik domestik yang ujung-ujungnya rebutan kursi, tiada lain ekonomi atau finansil menjadi faktor dominan. Karena sekarang dunia memasuki era Perjuangan Hak Asasi Manusia, maka penjajahan fisik seperti tempo dulu

tidak dilakukan. Paling-paling penjajahan fisik yang ada adalah kelanjutan dari penjajahan tempo dulu, yang sekarang belum dikembalikan kepada pribumi. Penjajahan sekarang berupa politik atau ekonomi, misalnya embargo ekonomi. Tentu, persoalannya sangat kompleks, tidak sesedarhana ini penjelasannya.

Nah, kita kembali kepada konflik di atas. Konflik itu tidak disebabkan oleh perbedaan agama, budaya atau etnik semata. Ada faktor lain yang melekatinya, seperti, rendah dan sempitnya pemahaman terhadap ajaran agama. Tetapi, kepentingan politik yang mempolitisir berbagai latar belakang kehidupan merupakan faktor penyebab yang paling banyak. Untuk membuktikannya tidak mudah; intel pun kewalahan mencari bukti fisik. Tetapi, “saksi ahli” tampaknya akan berkata begitu. Hakikat politik adalah kegiatan, bukan kekuasaan. A.S. Hornby, A.P. Cowic menyatakan, “*politic is acting or judging wisely, well judged, prudent*” (Hornby: 1974, 645). Ini bukan berarti kekuasaan itu di luar politik. Justru, kegiatan dengan kekuasaan tidak perlu dipisahkan.

Berkaitan dengan ideologi, misi, kegiatan dan kekuasaan, maka politik tidak terlepas dari kegiatan mempengaruhi dan rekrutmen anggota, setidak-tidaknya menarik simpati. Dalam politik, kekuasaan dan negara, saling berhadapanlah penguasa dengan rakyat. Bahkan, ada yang secara konyol berkata, “yang berhadapan adalah pihak penindas dengan pihak yang ditindas.” Karena posisinya yang berbeda selalu terkesan kepentingannya berbeda. Karena itu kekuasaan dan politik mengurus hubungan antara penguasa, raja, ratu maupun presiden, dengan rakyat. Dalam hubungan ini maka politik yang ide dasarnya ingin menciptakan suasana teratur dan tertib harus berbicara tentang aturan main, lazim disebut konstitusi. Adalah sulit dimengerti bila dalam kenyataan, politik ditempatkan sebagai wahana berkilah tentang sesuatu untuk menguntungkan “warganya” sendiri dan menelantarkan warga lain. Di sini politik dimaknai cara menjegal dan menjungkalkan pihak lain, baik itu seagama, selairan, se suku, asalkan berbeda kandangnya. Perpolitikan semacam ini tidak pernah menyetatkan bangsa dan negara, bahkan menimbulkan was-was terus menerus. Negara berkepentingan agar warganya bersatu bahu membahu, tetapi logika politik berkepentingan untuk membuat garis pisah antara kawan dan lawan. Itu sebabnya ada fatwa keagamaan bahwa dalam sebuah negara tidak perlu ada partai politik, disebut *firqah*, karena ia tidak punya semangat

ukhwwah, tetapi lebih pada semangat perpecahan. Fatwa ini sejalan dengan pernyataan al-Qur`an bahwa Allah mencipta manusia terdiri atas pria dan wanita, bersuku bangsa, dengan segala implikasi keragamannya, adalah untuk saling bertindak arif—dalam bahasa al-Qur`an disebut *li ta`arafu* (S. al-Hujurat: 10). Bertindak arif tiada lain adalah mendekatkan yang tadinya jauh, merapatkan yang tadinya renggang, meningkatkan saling simpati yang tadinya kurang, dan segala upaya menciptakan suasana persatuan dan kebersamaan, bukan pertikaian seperti yang dikembangkan dalam logika kekuatan politik dalam pemilu selama ini.

Fundamentalisme

Sebagai makhluk yang lemah manusia perlu bersandar kepada Tuhan, dengan memilih satu agama yang diyakininya benar. Pengalaman dan pengamalan agama itu beragam. Tentu, setiap orang beragama dengan segala ritual ibadahnya mempunyai motivasi tertentu, sesuai dengan pandangan hidup pemeluknya. Kegiatan ibadah dilakukan selalu dikaitkan dengan berbagai kepentingan, seperti, dagangan laris, tanaman tidak diserang *wereng*, lulus ujian, selamat di perjalanan, memperoleh jabatan tinggi, dan sebagainya (Mulkan: 2001). Di sini agama menjadi sandaran untuk meningkatkan kehidupan ekonomi. Di banyak penelitian diungkapkan bahwa disadari atau tidak, kelas sosial itu tetap ada, kendati penamaan kelas itu dipandang tidak perlu karena bisa menyakitkan. Setidaknya, kita menemukan masyarakat terpelajar dan masyarakat kurang terpelajar. Masyarakat kurang intelek yang biasanya direpresentasikan oleh petani, buruh, nelayan, menempatkan agama sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara ril. Masyarakat terpelajar menerima agama yang memiliki konsep sosial ekonomi budaya untuk menciptakan suasana damai dan teratur serta menaikkan gengsi. Agama yang tidak dapat menjawab persoalan mereka, secara konseptual, akan ditinggalkan dan orang pun seperti di belantara, yang berlaku hukum rimba. Kelompok pertama dalam beragama lebih berorientasi magis, kelompok kedua lebih berorientasi etis.

Oleh pemeluknya, agama itu karena menyelamatkan orang di dunia dan di akhirat, maka harus disebarluaskan agar orang lain merasakan keselamatan yang sama. Agama bukan hanya mengandung ajaran ritual, tetapi juga mengandung ajaran sosial seperti, ajaran cinta kasih, suka berderma, suka menolong, menciptakan perdamaian. Agama melarang pencurian,

penipuan, curang, penghinaan, zina, penganiayaan dan kejahatan lainnya. Bahkan, dalam Islam, tindak pidana tertentu disebutkan ancaman hukumannya dalam Kitab Suci. Di dalam al-Qur'an dinyatakan ancaman hukuman pencurian adalah potong tangan. Zina diancam hukuman jilid (cambuk) seratus kali. Kitab Suci lain menyebut perbuatan melawan hukum tanpa menyebut ancaman hukumannya. Misalnya, *The Ten Commandments* (Pernintah Sepuluh) yang dibawa oleh Nabi Musa berisi (1) Tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah swt.; (2) tidak boleh membuat patung; (3) tidak boleh menyembah patung; (4) tidak boleh membunuh; (5) tidak boleh mencuri; (6) tidak boleh berzina; (7) tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan; (8) tidak boleh bersumpah palsu; (9) tidak boleh merebut isteri orang; ini terasa lucu. Tetapi pada waktu itu memang ada problem keluarga berkait dengan ini. Raja secara arogan suka meminta isteri rakyatnya yang dipandang cantik. Konon, ketika Nabi Ibrahim mengembara ke Mesir, Raja tertarik hendak meminta Sarah (isteri Ibrahim), sebagai isterinya. Ibrahim tahu kalau wanita yang dilobangi daun telinganya dianggap budak. Maka Sarah dilubangi kupingnya oleh Ibrahim, dan sang raja tidak melanjutkan keinginannya. Sebagai obat sedih lobang telinga, Ibrahim memasang emas pada lobang tersebut, dan Sarah menjadi lebih Indah dari aslinya. (10) Diperintahkan menghormati Hari Sabat.

Pemeluk agama berkeyakinan bahwa ajaran sosial yang terkandung dalam agamanya merupakan fundamen yang harus diberlakukan dalam pranata sosial kalau ingin masyarakat tenteram dan damai. Ketika pranata sosial agama satu dengan yang lain secara literal tidak sama, sementara pemeluknya memperjuangkan pemberlakuannya secara literal, maka peluang konflik agama menjadi terbuka.

Fundamentalisme berasal dari bahasa Latin "fundamen" yang berarti landasan. Kata fundamentalisme lahir di dunia Barat untuk menyebut paham keagamaan kalangan Kristen sekte-sekte tertentu yang ketika berhadapan dengan sekularisme mereka bersikeras kembali kepada dasar paham keagamaan mereka. Dengan kata lain, "fundamentalisme" digunakan untuk mendeskripsikan aliran-aliran yang ingin mengembalikan pemahaman Kristiani ke interpretasi Injil literal sebagai fundamen agama Kristen agar terjauh dari arus modernisme liberal. Semua temuan modern, terutama yang menyangkut pranata sosial, yang secara literal bertentangan dengan cara pandang tersebut harus ditentang dan dinyatakan keluar dari agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk mengidentifikasi pemeluk agama

lain, termasuk pemeluk Islam, yang ingin kembali kepada ajaran dasar agama, tidak mengikuti interpretasi yang menyimpang jauh dari ajaran dasar tersebut. Dengan kata lain, akhirnya fundamentalisme dialamatkan juga kepada pemeluk agama di luar Kristiani.

Para orientalis menggunakan kata fundamentalisme dengan tekanan yang bervariasi. W.M. Watt menyatakan bahwa fundamentalis Islam adalah kaum muslimin yang menerima Islam sepenuhnya dan ingin mempertahankan pandangan dunia tradisional (Watt: 1998). R. Garaudy merujuk kamus *Grand Larousse Encyclopedique* terbitan tahun 1987 yang memberikan informasi bahwa “fundamentalisme adalah sikap beberapa penganut Katolik yang menentang semua bentuk pembaharuan, saat mereka menyatakan keterikatan mereka terhadap warisan lama”(Garaudy: 1993, 4). Selanjutnya Garaudy menyebut fundamentalisme untuk suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan, baik yang bersifat agama, politik maupun budaya yang dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajarannya di masa lalu. Ciri utama fundamentalisme adalah: absolutisme (keangkuhan intelektual), eksklusifisme (kesombongan “kelas” sosial), fanatisme (kesombongan emosional), ekstremisme (keterlaluhan sikap mental), dan agresivisme (keterlaluhan tindakan fisik).

Sementara, John Naisbitt dan Patricia menyebutkan, “fundamentalisme adalah gerakan emosional reaksioner yang bersifat otoriter, tidak toleran dan bersemangat memaksa, melihat segala sesuatu secara hitam putih dan tidak kenal kompromi” (Naisbitt & Abuberne: 1990, 278-279). Tentu, tidaklah bijaksana menuding gerakan kelompok pemeluk agama tertentu, bahwa mereka dipastikan punya ciri utama seperti disebut di atas tanpa mengadakan penelitian lebih dulu. Tetapi dapat dirasakan bahwa fundamentalisme kelompok beragama telah menyulut api permusuhan dan mencabik-cabik hubungan yang serasi antar kelompok. Karena dikecewakan oleh teman sejawat seseorang menggerakkan pengikutnya untuk memusuhi teman tadi habis-habisan dengan tuduhan perbedaan faham yang fundamental. Untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sang teman dituduh sebagai KKN, atau primordialisme, karena, istilah itu cukup menguntungkan dalam pembentukan opini publik. Orang yang berpretensi sebagai pemimpin dengan cara ini amat berbahaya bagi keutuhan. Masyarakat pendukung harus segera ditingkatkan intelektualitasnya agar pembodohan umat oleh pemimpin yang sok pinter dan emosional semacam ini tidak berkepanjangan. Perjuangan pemimpin tolol seperti ini tidak pernah berhasil kecuali sekedar menciptakan permusuhan.

Fenomena ini merebak di berbagai lapisan, regional sampai nasional.

Bagi Garaudi dan juga John Naisbitt, fundamentalisme tidak hanya dimunculkan oleh kelompok orang beragama, tetapi juga oleh kelompok paham sekular, yang dampaknya tidak kalah dahsyat dibanding Perang Salib. Fundamentalisme sekular di Barat berasal dari keyakinan bahwa semua persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Norma sosial apa saja harus merujuk ke sana. Ajaran sosiologi naturalisme yang diajarkan Auguste Comte yang kemudian dikenal dengan aliran positivisme tidak lepas dari keberhasilan ilmu pengetahuan menyibak *nature*. Karena bangsa Eropalah yang mula-mula berhasil *mewedarkan* rahasia alam dengan ipteknya, maka mereka menempatkan diri sebagai bangsa terunggul di bumi. Semua bangsa mesti berkiblat ke sana. Entah bagaimana mulanya, mereka merasa wajar mengembangkan imperialisme dan kolonialisme pada bangsa lain. Terlebih ketika dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, muncul ungkapan, “Negeri-negeri jajahan, dalam hubungan dengan negara-negara kaya, adalah pasar khusus bagi fungsi modal.” Pikiran lain berbunyi, “Pembentukan negeri jajahan berarti menciptakan pasar.” Dalam strategi politik internasional, pembentukan kekuatan (blok) bagi orang Eropa adalah keniscayaan. Diungkapkan, “...karena itu kita harus menguasai Tunisia, dan karena itu pula membutuhkan Saigon, Teluk Vietnam Selatan, dan sekarang ini Madagaskar. Kita berada di sana dan tidak akan meninggalkannya untuk selama-lamanya.” Dalam kaitan dengan kemanusiaan ungkapan “...kita harus mengatakan dengan tegas bahwa bangsa yang lebih tinggi memiliki hak untuk mengatur bangsa-bangsa yang lebih rendah.” Lebih dari itu dikatakan, “keunggulan Barat atas bangsa-bangsa terbelakang yang tidak patut disebut-sebut sebagai bangsa yang memiliki hak-hak asasi manusia.”

Oleh Garaudy, fundamentalisme Barat dinilai tidak rasional dan membatu, diberlakukan sekitar lima abad yang lalu. Ini merupakan justifikasi ideologis bagi kolonialisme. Dan yang paling mutakhir adalah “Penjarahan orang-orang Amerika Serikat di Teluk Persia.” Ada standar ganda digunakan Amerika ketika menghadapi kasus yang sama pada kelompok yang berbeda. Ada sejumlah tuntutan Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi agar Amerika menghentikan kezalimannya di beberapa region. Pada 12 Oktober 1983 Amerika Serikat menyerbu Granada, pada 21 Desember 1989 Amerika Serikat menyerang Panama, Juni 1967 Israel yang jelas sekutu Amerika Serikat menduduki Yerusalem, Gaza, dan Tepi

Barat. Tetapi resolusi itu ditolak, justru Amerika menggunakan hak vetonya. Sebaliknya, ketika Irak menduduki Kuwait pada Agustus 1991, Amerika Serikat segera mengajukan resolusi untuk embargo terhadap Irak. Di samping itu mereka mengirimkan angkatan perang yang kekuatannya luar biasa untuk menumpas Irak (Garaudy, 1993, 9-10). Mengapa ini dilakukan oleh Amerika Serikat, karena kasus yang pertama dilihat dari kepentingan Barat yang kolonialis, sedangkan kasus ke dua dikaitkan dengan ancaman bagi kolonialisme Barat.

Setelah Uni Sovyet tumbang di penghujung abad 20, kediktatoran kolonialisme mengakibatkan Amerika Serikat scenaknya melakukan intervensi bersenjata di mana-mana tanpa ada kekuatan hak asasi manusia yang dapat mencegahnya. Penguasaan mereka terhadap Teluk dibungkus dalih melindungi Dunia Ketiga dari kekuatan lain yang mencoba merampas kekayaannya, dan singkatnya, menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan yang tiada tara. Menurut Garaudy, strategi kolonialisme seperti ini dijalankan Presiden Bush menggerakkan gelombang fundamentalisme di seluruh dunia Arab, sekaligus menyulut api permusuhan antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, sebuah permusuhan yang akan menggilas seluruh bangsa di Dunia Ketiga. Dan sebenarnya tindakan Bush ayah yang dilanjutkan Bush anak dalam kaitannya dengan dunia Timur Tengah tidak terlepas dari pijakan fundamentalisme yang tidak disadari. Hanya, siapa yang melawan Bush disebut teroris, dan siapa yang menjadi kawan disebut korban teroris kendati melakukan teror terus menerus seperti dukungan penuh mereka atas Israel. Beberapa pengamat mengatakan, Setelah Uni Sovyet yang menakutkan itu jatuh, Amerika Serikat merasa berhadapan dengan satu kekuatan lagi yang menakutkan, bahkan lebih menakutkan. Komunitas muslim. Untuk maksud ini ia harus mengkerdikan lawan, seperti Irak, yang dipandang berbahaya itu sebagai representasinya.

Di awal tahun 2003 ini tampaknya Bush salah langkah dan terlanjur basah. Kemauan kuatnya karena fundamentalismenya hendak menghancurkan Irak mendapat tantangan keras dunia internasional, bahkan dari dalam negerinya sendiri. Bila ia melanjutkan rencananya itu maka ia akan mendapatkan perlawanan yang lebih dahsyat lagi, baik dari luar maupun dari dalam. Tetapi bila ia mengurungkan niatnya, dunia berkata, ia merasa malu berat karena merasa dinilai kalah "main catur". Jadi, maju kena mundur kena. Beruntunglah Bush, karena ia di samping berhasil menguasai Irak juga dapat mengemukakan isu kepada dunia bahwa

Saddam dengan kediktatorannya sebagai Presiden Irak berperilaku tidak manusiawi terhadap lawan politiknya, seperti penguburan secara masal.

Bagaimanapun, Amerika tidak dapat menutupi bahwa serangan terhadap Irak, pengejaran terhadap Usamah bin Laden di Afganistan, pembiaran atas kebrutalan Israel terhadap bangsa Palestina, terkait dengan kepentingan menghancurkan kekuatan Islam. Untuk menguatkan ini ia menyebutkan bahwa kelompok orang Islam adalah sarang teroris, dan bangsa Barat korbannya. Pikiran semacam ini terbentuk oleh propaganda di sana yang sengaja menyebarkan permusuhan terhadap Islam. Edward Sa'id melaporkan, orang Amerika tidak segan-segan membuat cerita film yang menggambarkan betapa biadabnya orang Islam (Arab). Dalam cerita itu dilukiskan, orang Islam setelah mengadakan penjarahan selalu memperkosa korbannya. Celaknya, banyak masyarakat secara tidak kritis langsung percaya terhadap cerita hayalan ini. Dalam hal konflik Israel-Palestina, mereka percaya terhadap laporan wartawan mereka yang sebenarnya tidak menguasai medan dan bahasa. Sang wartawan dalam melipun berita mempercayakan penduduk setempat meliput berita dengan imbalan bayaran tertentu (Edward Said: 2002, h. 50-90). Ini menunjukkan bahwa kepentingan yang kompleks telah membawa bangsa "terpelajar" terjebak dalam fundamentalisme yang sangat membahayakan kedamaian internasional.

Demokrasi: antara harapan dan kenyataan

Dimaklumi bersama bahwa demokrasi menurut bahasa artinya kekuasaan di tangan rakyat. Realisasi ide demokrasi berangkat dari kepenatan dan kebosanan rakyat yang selalu dijadikan obyek kekuasaan. Untuk mewujudkan kebersamaan, rakyat harus tunduk pada kemauan penguasa. Di Barat, hal ini berlangsung lama karena tidak ditemukan konsep pemerintahan yang "seimbang" antara hak rakyat dengan hak penguasa, baik di lembaga negara maupun lembaga agama. Sekarang dibalik, bagaimana kalau rakyat saja yang berkuasa. Haluan dan alur kebersamaan ditentukan oleh rakyat. Itulah yang disebut demokrasi. Ia menjadi populer semenjak Revolusi Perancis. Demokrasi itu sendiri sebenarnya sebuah ide anti absolutisme yang ditampilkan oleh para raja sebagai penguasa. Kalau selama ini tidak ada kebebasan bagi rakyat atau kaum terjajah, maka demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dengan batas, tidak mengganggu hak orang lain. Tujuan penting dalam demokrasi adalah

kebersamaan, bukan pemaksaan. Dengan demokrasi tidak lagi ada penjajahan, baik oleh bangsa lain maupun oleh bangsanya sendiri. Sekadar menerapkan kemenangan suara terbanyak dapat melahirkan absolutisme baru, pemaksaan mayoritas terhadap minoritas. Karena demokrasi itu anti pemaksaan pendapat, sikap dan pendirian, maka berbagai pendapat yang berbeda seharusnya dapat diselesaikan dengan jalan kompromi. Bila tidak, demokrasi tinggal sebuah kulit yang membungkus absolutisme.

Seharusnya sistem demokrasi hanya memunculkan negara republik dengan presiden sebagai kepala negaranya. Republik artinya kembali kepada publik/rakyat, demokrasi artinya kekuasaan di tangan rakyat. Tetapi ternyata ada banyak negara kerajaan yang mengadopsi sistem demokrasi. Di antara negara-negara Barat dengan demokrasi yang sangat stabil dan mapan, banyak yang berbentuk kerajaan, seperti Swedia, Denmark, Norwegia, Belanda, Inggris, Luxembourg, dan Belgia dengan ciri khusus yang mereka miliki masing-masing. Negara demokrasi yang mengambil bentuk republik juga memiliki ciri-ciri khusus pula, seperti Finlandia, Irlandia, Jerman, Perancis, Swiss, Austria dan Italia. Di luar Eropa, demokrasi diterapkan di Amerika Serikat secara kukuh yang republik, dan di Kanada, Australia dan Selandia Baru yang anggota *Commonwealth*. Sebagian besar demokrasi di Barat dilaksanakan dengan sistem parlementer. Amerika Serikat dengan mengambil sistem presidensial menampilkan gaya demokrasi yang berbeda dengan lainnya. Dengan gambaran itu kita tahu bahwa demokrasi itu bukan sistem sosial-politik yang tunggal. Demokrasi dipraktekkan dengan pandangan, pengertian dan cara yang berbeda-beda di berbagai negara. Kendati tampilan berbagai negara demokrasi itu berbeda-beda, tetapi mereka sepakat bahwa dalam demokrasi, semua orang ditempatkan sejajar, hukum dan keadilan ditegakkan, tidak boleh ada pemaksaan kehendak.

Kemapanan sistem demokrasi di negara-negara Barat melalui perjalanan panjang dan melelahkan. Ketika Indonesia lahir pada tahun 1945, demokrasi telah menjadi pilihan sistem kenegaraan dan pemerintahan. Tinggal lagi, demokrasi ala mana yang cocok. Presidensial maupun parlementer pernah dicoba. Sekarang kita masih gagap, mencari sistem demokrasi yang paling cocok untuk budaya kita. Demokrasi mempunyai karakter dapat mengadakan koreksi terhadap siapa saja, bahkan terhadap diri sendiri. Dengan demikian, demokrasi mengakui bahwa perbaikan itu akan dilakukan terus-menerus, sebuah pengakuan akan relativitas.

Di sini demokrasi diharapkan menampung semangat perubahan terus-menerus. Kalau begitu, demokrasi adalah sebuah proses menuju kemajuan dengan ciri utama kebebasan dan kebersamaan. Sebagai proses, demokrasi perlu diberi *lambaran* paham keterbukaan, bertanggungjawab dan moralitas tinggi. Sebab, paham tertutup tidak memberi peluang kepada datangnya masukan sehingga tidak mendorong munculnya perubahan, apalagi kemajuan. Dengan begitu paham tertutup akan ketinggalan jaman. Begitu juga moralitas dan tanggung jawab menjadi penting bagi demokrasi agar terhindar dari kebrutalan dan pragmatisme.

Di muka disebutkan bahwa pengalaman bangsa Barat membentuk masyarakat demokratis itu memerlukan waktu panjang, dan hasilnya pun masih harus dievaluasi terus-menerus. Bila tidak, ia menjadi berhala karena ia ciptaan manusia yang diabsolutkan oleh penciptanya sendiri. Di negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi baru diujicobakan oleh hampir semua komponen bangsa. Mereka benar-benar demam demokrasi. Kalau tidak mengklaim dirinya sebagai demokrat orang merasa takut dituduh tidak reformis atau ketinggalan jaman. Demokrasi dimaknai sesuai dengan kesanggupan pikiran masing-masing komponen. Atas nama demokrasi orang merasa memiliki kebebasan seluas-luasnya yang selama ini dikekang oleh kekuasaan otoriter. Lalu, ia merasa boleh berkata dan berbuat apa saja, tidak peduli apakah itu mengganggu kepentingan orang lain apa tidak. Kemarahan terhadap lawan politik ditumpahkan tanpa memperhatikan segi kepantasan. Bahasa yang dipakai sengaja dipilih agar mudah membakar. Dengan demokrasi rasanya saling menjegal lawan politik menjadi menu utama dalam berpolitik. Dalam demokrasi yang kemudian dikaitkan dengan keterbukaan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, tidak ada rahasia. Apa yang tadinya rahasia boleh dibuka dan dikomentari. Demokrasi dengan tampilan semacam ini tampaknya tidak memberi jaminan mendatangkan kesejukan, ketenteram dan kenyamanan yang menjadi dambaan setiap orang. Sebab, demokrasi yang tadinya dipersiapkan untuk membasmi absolutisme justru memunculkan absolutisme lain, setidaknya, absolutisme kebebasan.

Perjuangan tentang Hak Asasi Manusia oleh masyarakat internasional mempunyai tujuan utama agar hak perseorangan atau kelompok tidak terganggu oleh kebebasan orang lain. Di sini kebebasan orang ada batasnya. Demokrasi yang diperjuangkan pun sebenarnya semacam polisi lalu lintas yang mengatur kebebasan tetapi tidak mengganggu kebebasan

orang lain. Jadi, penerapan demokrasi yang ternyata mengabaikan kebebasan orang lain hanyalah demokrasi jadi-jadian; mungkin karena belum jadi betulan. Sadar atau tidak, terkadang mahasiswa yang sedang belajar dan sok tahu demokrasi terjebak dalam demokrasi model ini. Dengan dalih menjunjung tinggi demokrasi, dalam memperjuangkan kemauannya (yang belum tentu benar, tetapi karena dibayar oleh pihak yang berkepentingan) mereka memaksakan kepada lembaga perguruan tinggi di mana mereka belajar, agar kemauannya dipenuhi. Demo merupakan senjata andalan. Celaknya lagi, isu yang beredar terkadang berupa opini yang berbau fitnah, yang dikemas oleh pihak tertentu yang berkepentingan, dengan meyakini bahwa opini itu fakta kebenaran. Itu pemaknaan demokrasi dengan "kekuasaan diperjuangkan dengan cara demo", bukan "kekuasaan di tangan rakyat". Bukannya demo tidak diperlukan, tetapi, belajar demokrasi berarti belajar tidak memaksakan kehendak. Belajar demokrasi berarti belajar mendudukkan, mana opini dan mana fakta.

Biasanya demokrasi terkait langsung dengan penegakan supremasi hukum. Tetapi karena bingkai yang digunakan membungkus demokrasi adalah kebebasan, maka hukum dan norma susila dikesampingkan, karena hukum dan norma-norma itu membatasi gerak kebebasan. Dengan kebebasan pers, media massa tertentu merasa boleh memuat pornografi yang jelas-jelas itu tidak cocok dengan budaya bangsa. Itu merupakan gejala anomali, janggal dan menyimpang dari akal sehat. Kenapa belajar demokrasi menempuh jalan seperti ini. Demokrasi semacam ini lebih menonjolkan kebebasan memaksakan kehendak terhadap pihak lain dari pada menghargainya. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah diri sendiri bila maksud perjuangan menghindari konflik, tetapi yang muncul justru konflik baru.

Islam dan demokrasi

Di masa awal kelahirannya, Islam punya pengalaman bernegara menghadapi mesyarakat majemuk, baik etnik maupun agama, di bawah kepemimpinan Muhammad Rasulullah dengan ibukota Madinah. Banyak ahli, baik Barat maupun Timur, berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan Muhammad Rasulullah berangkat dari Piagam Madinah. Piagam ini menyebutkan kewajiban warga Madinah, baik orang muslim maupun Yahudi, baik pendatang (*muhajirin*) maupun penghuni tetap yang menolong pendatang (*anshar*), mempertahankan kotanya dari serangan musuh. Masing-masing unsur warga tidak dibenarkan

bekerjasama dengan pihak musuh untuk menghancurkan negara Madinah. Siapa melanggar piagam ini akan ditindak oleh pemerintah. Selanjutnya, semua warga mendapatkan hak perlindungan dari pemerintah dari berbagai ancaman. Di sini kelihatan bahwa berbagai unsur kekuatan dihimpun dan dirangkul sebagai kekuatan besar sehingga ketika datang serangan dari luar dapat dipatahkan bersama. Sikap ini berbeda dengan multi partai di sebuah negara modern yang sepertinya tidak berkepentingan menciptakan kebersamaan, lebih pada menang-menangan. Bangsa yang komponen-komponennya tidak mau bersatu (dalam arti yang sebenarnya) akan selalu menjadi bangsa yang tertinggal karena mereka menciptakan kesulitan mereka sendiri. Ibarat hidup bertetangga, ia menciptakan sakit tubuhnya sendiri sehingga tidak sempat tampil berdampingan secara wajar dengan tetangga lain.

Sudah menjadi tabiat bahwa setiap orang ingin diperlakukan secara adil dan sederajat. Ide Piagam Madinah yang menempatkan semua komponen kota Madinah sederajat sesuai dengan tabiat manusia. Tindakan pengusiran Muhammad Rasulullah terhadap sebagian unsur Yahudi karena penyimpangan mereka atas Piagam Madinah sesuai dengan konstitusi. Oleh para pengamat modern, Piagam Madinah disebut sebagai konstitusi modern yang lahir pada masa yang sangat dini, di mana orang belum berpikir tentang kesamaan hak dan kewajiban.

Untuk ukuran tempo dulu, bernegara itu menggambarkan kepatuhan rakyat terhadap raja. Kekuasaan raja bersifat absolut. Sebagai kepala negara Rasulullah telah menunjukkan kepada dunia, menerima kritik dan masukan serta menghargai karya orang lain. Ia menyatakan, "Kalian lebih mengetahui urusan duniamu" (al-Hadits). Al-Qur'an menyebutkan, "Katakanlah, sesungguhnya aku manusia biasa, diberi wahyu oleh Tuhan." Di sini ia menunjukkan, dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa ia tidak kebal kritik, tetapi dalam kapasitasnya sebagai utusan Allah seperti dalam aspek ritual, ia harus dipatuhi. Karena itu untuk urusan duniawi Rasulullah mengajak musyawarah kepada warganya.

Menjelang wafatnya, Rasulullah tidak menunjuk penggantinya sebagai kepala negara. Tetapi dalam hal imam shalat, beliau menunjuk Abu Bakar penggantinya. Agaknya Abu Bakar dinilai sebagai orang yang kepribadiannya paling berkualitas dibanding shahabat lainnya. Hasil "pemilu" dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pengganti beliau, selalu dikait-kaitkan dengan penunjukan Rasulullah kepadanya untuk imam shalat. Apapun faktanya,

jelas bahwa suksesi ini tidak didasarkan keturunan seperti yang terjadi di negara-negara kerajaan. Begitu juga dengan suksesi dari Abu Bakar ke Umar bin al-Khattab, lalu berpindah ke Usman bin 'Affan, dan kemudian pindah ke 'Ali bin Abu Thalib, tidak didasarkan pada keturunan, tetapi lebih pada pelibatan orang banyak dengan suara mayoritas (Hitti: 1974, 183). Setiap kali pengangkatan kepala negara baru selalu dimulai dengan *bai'ah*, jabat tangan khalayak terhadap pejabat baru sebagai tanda janji kesetiaan, baik oleh rakyat maupun oleh pejabat baru itu. Ini menunjukkan bahwa pada awal Islam, suksesi kepemimpinan kepala negara telah berinisiatif melakukan apa yang belakangan disebut demokrasi. Setidaknya, hal ini berlangsung selama kepemimpinan empat tokoh yang disebut terakhir ini tadi, mereka dikenal dalam sejarah sebagai *Khulafa al-Rasyidun*.

Harus diakui bahwa "demokrasi" yang dijalankan tempo dulu tidak sesempurna sekarang. Kalau sistem demokrasi sekarang dikenal pemilahan kekuasaan dalam rangka kontrol kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, maka demokrasi tempo dulu belum mengenal itu. Kendati pemilahan kekuasaan belum ada, tetapi semangat penegakan keadilan sangat tinggi. Maka dari itu, Khalifah Umar pernah menyatakan, bersedia diluruskan dengan pedangnya bila ia menyelewengkan pemerintahan. Tetapi kesadaran perlunya fungsi kontrol sudah ada, ditandai dengan dimunculkannya *ahlul balli wa al-'aqdi*, misalnya. Lembaga ini berisi orang-orang terpelajar yang secara harfiah berarti "mengikat dan melepas tali" pemerintahan; pengendali pemerintahan agar tidak salah arah.

Entah setan mana yang berhasil menggoda, selepas kepemimpinan *Khulafa al-Rasyidun*, pemerintahan Islam berubah menjadi sistem kerajaan dalam waktu lama, tepatnya, semenjak tahun 661 M. hingga perempat pertama abad 20 M. Dalam kurun waktu yang lama ini terjadi distorsi kesejarahan. Bangsa Arab sendiri sebenarnya tidak memiliki pengalaman memimpin kerajaan. Prestasi kekuasaan tertinggi mereka adalah kepala suku, bukan raja. Tentu, karena secara geografis, daratan Arab tidak membangkitkan selera orang menjadi raja. Tetapi setelah mereka melihat kekuasaan kerajaan di dunia luar Arab, tampaknya mereka mulai percaya diri untuk mencoba mendirikan kerajaan (dinasti), itupun di luar Arab. Damaskus, selanjutnya Bagdad.. Dan mereka berhasil, apalagi tidak sendirian. Artinya, di dunia Barat pun sistem monarkhi tidak bergeming hingga abad 18 M.

Ada kesamaan pikiran antara ide demokrasi di Barat yang, seperti disinggung di muka,

popularitasnya dimulai era Revolusi Perancis (Ensiklopedi Indonesia: 1986; 2897), dengan penyelenggaraan suksesi masa Khulafa al-Rasyidun. Kalau normatif demokrasi anti pemaksaan kehendak, maka normatif Islam mengajarkan musyawarah. Kalau normatif demokrasi menghendaki kesamaan derajat manusia, maka normatif Islam menunjukkan pahala besar bagi orang yang memerdekakan hamba sahaya. Karena ide demokrasi itu tidak bertentangan dengan Islam, maka masyarakat Islam yang mendirikan negara setelah terlepas dari cengkeraman penjajah semenjak pertengahan abad 20 dan menyelenggarakan pemerintahannya, menerapkan ide demokrasi tersebut. Tetapi hal-hal normatif itu sering dilanggar, baik orang Barat maupun orang Islam. Ajaran demokrasi belum mengubah Amerika yang tetap diskriminatif dalam menyikapi bangsa Timur dengan Barat, Israel dengan Irak atau Palestina, dan seterusnya. Dalam masyarakat Islam tertentu, perbudakan perlu dilestarikan untuk mencari pahala dengan cara memerdekakannya. Yang mereka tangkap bukan ajaran penghapusan perbudakan.

Dari kisi sejarah, Islam lebih tua dari pikiran demokrasi. Tetapi tidaklah terlalu penting mengatakan bahwa pikiran demokrasi diadopsi dari norma Islam. Sekiranya masing-masing pihak memunculkan ide kemanusiaan yang disebut demokrasi, maka kita dapat berkata bahwa demokrasi adalah ide universal, yang setiap era dapat muncul manakala hak asasi manusia kurang mendapat tempat yang layak.

Komunikasi

Pluralitas adalah keniscayaan. Jika Tuhan menghendaki, manusia itu dijadikan satu versi. Tetapi Tuhan menghendaki kebinekaan. Tinggal lagi, seberapa jauh orang atau kelompok toleran terhadap pihak lain yang bineka itu. Disadari atau tidak, jari jemari fundamentalisme itu menggerayangi semua bangsa. Tatanan internasional yang seharusnya menjunjung tinggi kemanusiaan diterapkan semena-mena. Politik apartheid di Afrika Selatan dan agresi Israel terhadap Palestina serta distribusi kekayaan global yang tidak merata merupakan bukti fundamentalisme tertentu, atas dasar kecurigaan, bahkan keyakinan, bahwa ideologi pihak lain itu salah dan harus segera diganti dengan ideologi yang sedang diperjuangkan. Terorisme dengan baju jihad, atau sebaliknya, jihad disamakan dengan terorisme telah membingungkan masyarakat luas. Rencana penyerangan Amerika Serikat atas Irak dengan cara mendesak

PBB agar mendapat dukungan merupakan kecongkakan primordialisme yang sulit dimengerti. Tampaknya merupakan kelanjutan dari perasaan bangsa kulit putih lebih unggul dari bangsa lain seperti ketika mereka menjajah bangsa-bangsa Timur hingga pertengahan abad 20. Sulit dicarikan alasan, mengapa Amerika Serikat memaksakan harus menyerang Irak. Bila alasannya Irak menyimpan senjata pemusnah masal yang berbahaya, bukankah Amerika Serikat sendiri dan beberapa negara maju lain memilikinya? Bahkan akhirnya sampai sekarang, apa yang dituduhkan oleh Amerika Serikat tidak terbukti. Ini semua menunjukkan besarnya krisis moral dan intelektual melanda masyarakat dunia. Dunia modern yang seharusnya ditandai dengan rasionalitas dan kesantunan yang semakin meningkat tidak terwujud, malah kebrutalan yang ditampilkan oleh kaum intelek.

Tetapi sekiranya berbagai pihak menyadari pentingnya komunikasi dengan melepas segala latar belakang kecurigaan dengan pihak lain, niscaya berbagai ketegangan akan berangsur-angsur kendur. Komunikasi bukan sekadar saling tukar informasi dengan tetap mempertahankan kebenaran miliknya dengan menyalahkan milik orang lain. Komunikasi dimulai dengan saling pengertian, dilanjutkan dengan saling toleran dan bermuara pada saling merasakan apa yang dialami pihak lain. Itulah yang disebut ketulusan.

Komunikasi tidak mudah dilaksanakan karena rasa kesetaraan dan kesejajaran tidak ada. Masing-masing merasa lebih atas yang lain. Bangsa kulit putih merasa lebih unggul dari bangsa kulit berwarna, kaum sekular merasa lebih unggul dari umat beragama, pemeluk satu agama merasa lebih unggul dari pemeluk agama lain, penganut budaya liberal merasa lebih unggul dari penganut budaya tradisional. Mestinya itu semua disingkirkan. Itulah egaliter. Demokrasi harus berpijak dari egaliter. Kalau tidak, omong kosong saja. Agaknya perlu diperhatikan ajaran Nabi bahwa manusia itu terdiri atas berbagai suku dan kabilah semua setara. Yang membedakan kemuliaan adalah ketaqwaan (Q.S. Al-Hujurat: 10). Kalau sudah berbicara taqwa, yang berhak menilai hanya Tuhan. Manusia tidak menilainya lagi. Jadi, manusia melihat sesamanya harus dalam kesetaraan. Dikatakan juga bahwa manusia itu keturunan Adam. Tidak ada unggulnya orang Arab atas orang non Arab. Pendek kata, dalam konteks komunikasi, kesetaraan merupakan dasar menuju demokrasi yang sebenarnya. Terlebih bagi orang yang seagama. Konflik antar umat seagama lebih disebabkan oleh hilangnya rasa kesetaraan. Perasaan kelompok kami yang benar dan kelompok mereka yang

salah lebih ditonjolkan. Mereka tidak berkata, “sungguhpun mereka berbeda dari kami tetapi sama-sama berupaya dalam mencari kebenaran dan berjalan di atas kebenaran.” *Sū`uzann* lebih mengedepan dari pada *busnuzann*.

Daftar pustaka

- Budiman, Arif. *Dimensi Sosial Ekonomi dalam Konflik Antar Agama di Indonesia dalam Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, th. I.
- Ensiklopedi Indonesia. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1986
- Garaudy, R. *Islam Fundamentalis dan fundamentalis lainnya*, terj. Afif Muhammad, Pustaka, Bandung, 1993.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, The Macmillan Press Ltd, New York, 1974.
- Hornby, A.S. A.P. Cowic. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London, 1974.
- Madjid, Nurcholish. *Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang*, dalam *Ulumul Qur'an*, vol. IV, 1993, h. 7.
- Mulkan, Abdul Munir. *Struktur Sosial Keberagamaan Pemeluk Islam di Indonesia*, dalam *Al-Jami'ah*, Vol. 39, No. 2, Juli-Desember 2001.
- Naisbitt, John & Patricia Aburdene. *Megatrends 2000*, William Morrow and Company, 1990.
- Sa'id, Edward. *Covering Islam*, New York, Ventage Books, 1987.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- William Montgomery Watt. *Islamic Fundamentalism and Modernity*, Routledge, 1988.